

## EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA MIHU KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

Rif'atul Mahmudah<sup>1</sup>, Ahmad Baihaqi<sup>2</sup>, Jumaidi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : [rifatulmahmudah505@gmail.com](mailto:rifatulmahmudah505@gmail.com)

### ABSTRAK

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dilatar belakang dengan adanya permasalahan seperti Penelitian ini mengkaji tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih rendah, mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan program dalam membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PKH dinilai kurang efektif akibat minimnya monitoring yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, sehingga sering terjadi ketidaktepatan sasaran. Meskipun PKH memberikan bantuan langsung untuk meringankan beban ekonomi jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat belum terlihat signifikan, dengan banyak keluarga kembali ke kondisi pra-PKH setelah bantuan berakhir. Hasil Penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan cukup efektif hal ini dilihat : pertama, Ketepatan dalam penentuan waktu pada indikator pelaksanaan sudah efektif dan untuk ketepatan waktu kurang efektif. Kedua, Ketepatan menentukan pilihan pada indikator pelaksanaan cukup efektif dan untuk tindakan kurang efektif. Ketiga, ketepatan dalam menentukan tujuan pada indikator gambaran cukup efektif dan pengaruh cukup efektif. Keempat, ketepatan sasaran pada indikator berpikir tidak efektif dan sasaran cukup efektif. Saran untuk pendamping untuk lebih memperhatikan peserta PKH yang dimana peserta PKH harus dibimbing dan diberi edukasi agar pelaksanaan program keluarga harapan bisa tepat sasaran dan berjalan dengan baik. Program keluarga harapan ini akan berjalan dengan baik jika semua pihak yang ikut andil dalam program ini saling bekerja sama demi satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

**Kata Kunci:** Efektivitas Program, Keluarga Harapan

### ABSTRACT

*The problem discussed in this study is the Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Reducing Poverty in Mihu Village, Juai District, Balangan Regency in the background with problems such as This study examines the level of public understanding of the objectives, benefits, and mechanisms of the Family Hope Program (PKH) which is still low, resulting in less optimal use of the program in helping beneficiary families get out of poverty. In addition, the supervision and evaluation of the implementation of PKH is considered ineffective due to the lack of strict monitoring and continuous evaluation, so that there are often inaccuracies in targets. Although PKH provides direct assistance to ease the short-term economic burden, the long-term impact on the economic well-being of beneficiaries has not been seen significantly, with many families returning to pre-PKH conditions after the assistance ends. The results of the Research on the Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in reducing the poverty level in Mihu village, Juai District, Balangan Regency are quite effective, this is seen: first, the accuracy in determining the time in the implementation indicators is effective and the timeliness is less effective. Second, the accuracy of determining choices on implementation indicators is quite effective and for less effective actions. Third, the accuracy in determining the objectives of the picture indicator is quite effective and the influence is quite effective. Fourth, the accuracy of the target on the thinking indicator is not effective and the target is quite effective. Suggestions for companions to pay more attention to PKH participants where PKH participants must be guided and educated so that the peak of the Family Hope program can be on target and run well. This family hope program will run well if all parties who take part in this program work together for one goal, which is*

*to prosper the underprivileged community.*

**Keywords:** *program effectiveness, family expectations*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan pada umumnya diukur berdasarkan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin mutlak bila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatan tertentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yang antara lain diukur dari kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi perbandingan antara kelompok masyarakat yang tingkat pendapatannya di atas garis kemiskinan.

Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Prasyarat tersebut mencakup ketersediaan fasilitas pendidikan (misalnya anak usia sekolah) atau kesehatan (misalnya ibu hamil atau anak balita). Program Keluarga Harapan dahulu atau lebih dikenal dengan PKH pada tahun 2014 merupakan program jaminan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan mewajibkan anggota RTSM untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Saat itu masih memanfaatkan MDGs dan belum mengadopsi standar SDGs. Program ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan dan memungkinkan generasi berikutnya untuk keluar dari kemiskinan. Lima komponen Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang akan dibantu oleh PKH adalah (a) pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (b) pendidikan dasar; (c) kesetaraan gender; (d) menurunkan angka kematian balita; dan (e) menurunkan angka kematian ibu. Penyelenggaraan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007 sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program perlindungan sosial yang sering disebut dengan Conditional Cash Transfer (CCT) di seluruh dunia ini cukup efektif dalam membantu negara-negara tersebut mengatasi kemiskinannya, khususnya masalah kemiskinan kronis.

Berdasarkan data situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), [Bps.gp.id](http://Bps.gp.id), terdapat 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia per September 2019, dengan rincian 9,86 juta jiwa tinggal di perkotaan dan 14,93 juta jiwa berada di perdesaan. Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di antara kelompok miskin. Dalam program ini, keluarga berpenghasilan rendah yang teridentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mendapatkan bantuan sosial bersyarat. Ibu hamil dan anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah merupakan fokus utama PKH. Masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas juga menjadi target penerima manfaat PKH. Di sekitar penerimanya, PKH menawarkan fasilitas pelayanan kesehatan (FasKes) dan fasilitas pelayanan pendidikan (FasDik). Layanan sosial dasar, kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan dukungan, serta akses terhadap beberapa program perlindungan sosial yang bersifat tambahan berkelanjutan semuanya termasuk dalam fasilitas ini. Salah satu program yang dinilai berhasil adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, meningkatkan belanja keluarga, dan, lebih luas lagi, memotivasi mitra nasional dan daerah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diperkuat dengan menyempurnakan prosedur perusahaan, meningkatkan tujuan, dan memperkuat inisiatif terkait. Untuk membantu keluarga miskin agar segera keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih besar, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH wajib menerima subsidi BPNT, KIS jaminan sosial, KIP, serta

berbagai program pemberdayaan dan perlindungan yang didasarkan pada keberhasilan keluarga sosial lainnya. program. Fakta bahwa kemiskinan keluarga di Indonesia menurun dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September, dari total populasi 27.771.220 jiwa, merupakan bukti bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di negara ini. Pada bulan Maret, jumlah penduduk sebanyak 26.582.990 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.188.230 jiwa, atau turun 0,58% secara keseluruhan (BPS, 2017).

Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan, yang semakin hari semakin parah. Dinas Sosial, salah satu organisasi pemerintah yang bergerak di bidang sosial, bertugas melaksanakan program ini. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial dilakukan oleh PKH. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Proyek Pemerataan Pembangunan. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jika memenuhi standar, Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) bisa mendapatkan bantuan tunai melalui program ini. Kebutuhan ini berkaitan dengan peningkatan taraf sumber daya manusia, khususnya kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Setiap tahunnya, bantuan disalurkan dalam enam tahap: Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, NO: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007, Pemerintah Indonesia Kementerian Sosial mengembangkan program PKH ini.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam satu tahun, bantuan disalurkan dalam empat tahap. Besaran bantuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Program Keluarga Harapan (PKH) menyoar keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang tercantum dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTPFM). Program ini mencakup komponen kesehatan yang mencakup ibu hamil dan menyusui serta anak-anak usia 0–6 tahun. Komponen pendidikan yang memenuhi persyaratan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, dan siswa SMA/MA atau sederajat. . Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 3 menegaskan bahwa sasaran PKH adalah keluarga dan/atau individu yang tidak mampu, rentan, dan terdaftar dalam program data terpadu penanganan fakir miskin, yang mempunyai komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2016, terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lansia mulai usia 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Tingkat pengimplementasian masyarakat tentang tujuan, manfaat dan mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) masih rendah. Banyak keluarga penerima manfaat yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana program ini dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan, Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program PKH kurang efektif. Kurangnya monitoring yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan Meskipun PKH memberikan bantuan langsung yang membantu mengurangi beban ekonomi sementara, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat masih belum jelas. Banyak keluarga yang kembali ke kondisi pra-PKH setelah bantuan berakhir.



Penelitian terdahulu Yustina, 2021 “evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, pencapaian target Program, dan strategi pelaksanaan program. Kesimpulan dari evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yaitu Sasaran pelaksanaan program yang tidak akurat, kurangnya pengawasan yang ketat dan penilaian yang berkesinambungan, dan Meskipun PKH menawarkan bantuan langsung yang mengurangi beban keuangan jangka pendek, masih belum diketahui bagaimana hal ini akan berdampak pada kesejahteraan keuangan penerima manfaat dalam jangka panjang. Setelah bantuan dihentikan, banyak keluarga kembali ke keadaan sebelum PKH.

## **METODE**

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

#### 1. Ketepatan penentuan waktu

##### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah mencapai tujuan program yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya suatu program diperlukan. Pelaksanaan yang baik untuk setiap perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Mihu dapat disimpulkan bahwa sudah efektif karena mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah terlaksana sesuai dengan juknis Kemensos.

Berdasarkan hasil observasi di desa Mihu dapat disimpulkan bahwa sudah efektif karena pemerataan pada setiap daerah. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Balangan sudah berjalan mulai 2013 dan untuk mencakup semua kecamatan yang ada di kabupaten Balangan yaitu 13 Kecamatan pada tahun 2015, untuk kecamatan juai Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan mulai tahun 2014 dan pada tahun 2018 sudah mencakup semua desa yang ada di Kecamatan Juai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa sudah efektif. Di Kecamatan Juai Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan mulai tahun 2014 dan pada tahun 2018 sudah mencakup semua desa yang ada di Kecamatan Juai yang mana program tersebut sudah dirasakan oleh KPM PKH .

##### b. Waktu

Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara di Desa Mihu dapat disimpulkan bahwa kurang efektif untuk beberapa calon peserta maupun mendapat bantuan PKH itu tergantung dari kategori dalam keluarga maupun kondisi keluarga akan tetapi untuk waktu atau jangka waktunya tidak jelas karena tergantung dari keluarga apakah layak untuk mendapat bantuan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa untuk jangka waktu penyaluran bantuan PKH kurang efektif karena setiap bulan dan tanggal tidak konsisten dan sering juga terjadi keterlambatan waktu dalam penyaluran bantuan sehingga ketika KPM sedang perlu dana tersebut tidak dapat tersalurkan sebagaimana mestinya dan tidak adanya kejelasan waktu kapan calon KPM bisa mendapatkan bantuan PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif disebabkan jangka waktunya yang tidak konsisten, memang batasnya sampai kategori tersebut masih ada. Untuk calon penerima PKH juga tidak jelas harus menunggu keputusan dari Kemensos agar bisa menjadi penerima PKH.

#### 2. Ketepatan menentukan pilihan

##### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merujuk pada proses penerapan suatu program sesuai dengan perencanaan, mekanisme, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan bertujuan untuk menilai sejauh mana program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan di desa Mihu dapat disimpulkan bahwa cukup efektif. KPM PKH merasa jarak tempuh untuk ke agen mengambil pencairan dana

cukup jauh karena harus ke desa sebelah. Tapi dengan adanya bantuan PKH ini masyarakat sudah merasa cukup terbantu untuk kebutuhan sekolah anak mereka.

Berdasarkan hasil observasi di desa Mihu dapat disimpulkan bahwa cukup efektif. KPM PKH Desa Mihu cukup merasakan bahwa program keluarga harapan ini sudah berjalan dan mereka merasakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan program PKH dilapangan cukup efektif disebabkan untuk pengambilan bantuan dana sudah terbantu dengan dibuatkannya kartu ATM oleh pendamping PKH dan bantuan yang diberikan cukup membantu masyarakat.

b. Tindakan

Tindakan yang dilakukan ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurang efektif untuk bantuan yang tidak dipakai dengan semestinya akan diberi teguran kalau masih saja akan diberi sanksi, tapi masyarakat yang menerima tidak mengetahui hal itu.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif untuk tindakan terhadap bantuan yang diberikan akan diedukasikan oleh pendamping pada setiap pertemuan, karena pendampingan PKH seperti rapat pertemuan kelompok sangat jarang yaitu hanya 2 kali dalam setahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif untuk tindakan pendampingan baik pemantauan maupun pengawasan PKH disebabkan pelaksanaan rapat sekaligus pendampingan hanya dilakukan 2 kali dalam setahun dan perangkat desa juga hanya mengikuti arahan dari petugas PKH.

3. Tercapainya tujuan

a. Gambaran

Gambaran yang dimaksud adalah bagaimana program tersebut dilaksanakan, bisa dibilang adalah salah satu bentuk pemahaman terhadap program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cukup efektif untuk dana yang diberikan harus dipakai tergantung kategori keluarga misalnya anak Balita, SD, SMP, SMA, dan Lansia. Dipakai untuk keperluan kategori keluarga yang ada

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa cukup efektif. Penggunaan bantuan PKH ini digunakan untuk keperluan kategori sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan kategori.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa cukup efektif. KPM PKH sudah mengetahui bahwa dana bantuan yang mereka dapat itu dipakai kemana saja terutama untuk keperluan kategori yang ada dalam keluarga, meskipun ada sebagian KPM PKH yang kurang mengerti tetapi langsung diberikan pengarahan langsung oleh pendamping PKH.

b. Pengaruh

Pengaruh program terhadap lingkungan sekitar apakah program ini bersifat positif atau negatif tergantung keadaan sekitar yang menilainya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cukup efektif untuk pengaruh program PKH di kehidupan mereka. Bantuan yang disalurkan cukup membantu mereka untuk membeli keperluan kategori keluarga yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa cukup efektif. KPM PKH merasa pengaruh dari program PKH dapat mengurangi beban mereka untuk membeli keperluan walau tidak terlalu terasa, mereka berharap agar bantuan yang didapat bisa lebih besar lagi jumlahnya mengingat harga barang pasar saat ini mulai mahal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa cukup efektif. Untuk pengaruh bantuan dalam kehidupan. Karena dapat membantu mereka untuk membeli kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan anak sekolah.

#### 4. Ketepatan sasaran

##### a. Berfikir

Ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang memberikan pengaruh yang sifat positif maupun negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak efektif karena KPM yang menerima bantuan masih sedikit dan bantuan yang didapat jumlahnya terbilang kecil, sehingga mereka masih perlu mencari tambahan lain untuk membeli keperluan kategori keluarga yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa tidak efektif karena bantuan program PKH tidak mampu menurunkan presentase kemiskinan di desa Mihu masih ada beberapa masyarakat yang bermasalah dengan singkron data dan mereka juga tidak melaporkan hal tersebut ke pendamping PKH Desa sehingga tidak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tidak efektif karena KPM PKH banyak yang merasa bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan mereka dan bantuan yang dibeikan tidak terlalu terasa, untuk membeli perlengkapan sekolah saja masih perlu dana tambahan apalagi untuk kebutuhan ekonomi.

##### b. Sasaran

Sasaran ialah menentukan program ini akan berjalan ke mana yang akan menjadi fokus dalam program untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa cukup efektif yang tepat sasaran KPM PKH yang tepat sasaran adalah keluarga yang kurang mampu atau rentan miskin yang memiliki kategori PKH di dalamnya.

### **B. Faktor- faktor yang memengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan**

#### 1. Faktor penghambat

##### a. Kurangnya pendamping

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurang efektif untuk peran pendamping saat ini yang dimana jarang ada pendamping melakukan monitoring ke desa.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif karena pendamping jarang melakukan pertemuan untuk memberikan edukasi tentang PKH dan keluarga yang berakibat pada KPM PKH tidak mengetahui tentang program keluarga harapan (PKH).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif karena pendamping jarang melakukan pertemuan kelompok untuk mengedukasikan tentang PKH dan keluarga, sehingga jarang adanya monitoring dari pendamping untuk pelaksanaan program.

##### b. Ketepatan waktu

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurang efektif untuk beberapa calon peserta maupun mendapat bantuan PKH. Untuk waktu atau jangka

waktunya tidak jelas karena tergantung dari arahan pusat dan proses administrasi apakah layak untuk mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif dalam penentuan waktu berapa lama kita bisa mendapatkan bantuan karena ini bukan berdasarkan waktu karena bisa kondisi kategori itu berbeda-beda kalau anak balita, SD, SMP, SMA sampai jenjang pendidikan itu berakhir dan lansia sampai seorangnya meninggal. Jadi tidak mengetahui jangka waktunya berapa lama kalau batasannya untuk penerima PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kurang efektif disebabkan jangka waktunya yang tidak diketahui, memang batasnya sampai kategori tersebut masih ada. Untuk calon penerima PKH juga tidak jelas harus menunggu keputusan dari Kemensos agar bisa menjadi penerima PKH.

## 2. Faktor pendukung

### a. Ketersediaan fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa cukup efektif untuk ketersediaan fasilitas seperti pembuatan kartu ATM, tempat, dan lokasi agen untuk pengambilan pencairan dana bantuan PKH.

Berdasarkan observasi disimpulkan bahwa cukup efektif untuk ketersediaan fasilitas karena mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan PKH meskipun harus ke agen desa sebelah, kalau dulu KPM bisa melakukan pencairan dana di desa sendiri melalui BRI Link tetapi karena adanya kerjasama pemerintah dengan bank Mandiri untuk pencairan dana bantuan PKH jadi mereka mengambilnya ke agen Mandiri Link di desa sebelah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa cukup efektif untuk ketersediaan fasilitas baik berupa kartu ATM, lokasi agen, maupun tempat untuk perkumpulan atau rapat. Dengan tersedianya fasilitas ini masyarakat merasa mudah dan terbantu dalam menerima bantuan sehingga mendukung pelaksanaan program ini.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan cukup efektif hal ini dilihat : pertama, Ketepatan dalam penentuan waktu pada pelaksanaan program PKH sudah efektif dilihat dari Petugas PKH yang sudah menjalankan prosedur pelaksanaan PKH sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan untuk ketepatan waktu KPM PKH dalam menerima bantuan dalam pelaksanaan PKH kurang efektif karena sering terjadi keterlambatan disebabkan jangka waktu berubah-ubah. Kedua, Ketepatan menentukan pilihan diketahui bahwa untuk pelaksanaan rencana program keluarga harapan cukup efektif dengan KPM PKH yang sudah mengerti bagaimana proses pengambilan bantuan dana PKH yang diberikan dan untuk tindakan terhadap KPM PKH oleh petugas PKH kurang efektif karena pendampingan pertemuan kelompok hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Ketiga, ketepatan dalam menentukan tujuan dalam gambaran pemahaman cukup efektif karena KPM PKH untuk bantuan dana tersebut digunakan untuk keperluan kategori yang ada dalam keluarga dan untuk pengaruh cukup efektif yang sudah dirasakan KPM PKH. Keempat, ketepatan sasaran untuk berpikir tidak efektif. KPM PKH merasa bantuan yang didapat tidak mampu mengurangi persentase kemiskinan karena yang mendapatkan bantuan jumlahnya hanya sedikit, seharusnya lebih banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan program ini dan untuk sasaran penerima manfaat PKH cukup efektif karena rata-rata KPM PKH memang layak mendapatkannya. Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai

Kabupaten Balangan yaitu Faktor Penghambat : kurangnya pendampingan dan ketepatan waktu dana bantuan yang tidak menentu sehingga menyulitkan KPM PKH, Faktor Pendukung : adanya ketersediaan fasilitas seperti tempat untuk rapat, kartu ATM yang sudah dibuatkan dan Agen Mandiri Link terdekat untuk kelancaran penerima bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Bumi Askara : Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2021. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2021 (Online). Tersedia : <https://www.bps.go.id/galeri>.

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di

Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin’, *Administratus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administratus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) ‘EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) ‘Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur’, *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan*

*Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Hardani, Dkk.2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta CV Pustaka Ilmu.

Herdiansyah, Haris 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Untyk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humaika [https://digilibadmin.unimush.ac.id/upload/18922-Full\\_Text.Pdf](https://digilibadmin.unimush.ac.id/upload/18922-Full_Text.Pdf)

Ibrahim Anwar, Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sermog Kecamatan Taliwong Kabupaten Sumbawa Barat (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2020)

Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2014. Teori Perilaku Budaya Organisasi Makasar Refika Aditama

Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.

Mutiarin, Dyah & Arif Zainudin. 2014. Manajemen Dan Birokrasi Kebijakan Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pasolog. Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.

Pasolog. Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prof. Dr. H. Makmur, M.Si. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan. Bukuandatiba

Satori, Djam'an & Aan Komariah 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Sobarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta 55167: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi, R & D Dan Penelitian Evaluasi. Bandung Alfabeta